



PEMKOT APRESIASI KESADARAN WARGA BANTARAN Rumah Terdampak Penataan Bakal Diperbaiki

YOGYA (KR) - Penataan bantaran sungai dalam dua tahun terakhir gencar dilakukan melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Rumah warga yang terdampak penataan pun bakal diperbaiki menggunakan alokasi APBD Kota Yogya. Hal itu sekaligus sebagai bentuk apresiasi atas kesadaran warga.

Hanya, rumah yang akan dibantu perbaikan tetap harus memenuhi koridor kelayakan. Di antaranya pemangkasan rumah yang berdampak hingga 25 persen dan berjarak 10 meter dari talut sungai. "Dalam proses penataan kawasan kumuh di bantaran sungai diawali dengan membuat jalan inspeksi. Rumah warga yang sudah mepet ke bantaran pasti akan kena pemangkasan. Tentunya kita harus hadir," tandas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogya Agus Tri Haryono, Jumat (5/10).

Rumah terdampak yang menjadi sasaran perbaikan tersebut berada di wilayah penanganan kawasan kumuh yakni di Kelurahan Muja Muju, Baciro, Pandeyan, Giwangan, Warungboto dan Gedongkiwo. Wilayah lain yang bakal dibenahi dalam program Kotaku juga bakal diinventarisir. Tahun ini terdapat 50 rumah yang mendapat sentuhan perbaikan. Seluruhnya berada di bantaran Kali Gajah Wong di Muja Muju Umbulharjo dan Baciro Gondokusuman.

Agus menambahkan, kesadaran warga untuk merejakan sebagian rumahnya tidak mudah. Proses sosialisasi membutuhkan waktu yang cukup panjang. Namun warga akhirnya memahami ketika hasil penataan memberikan dampak positif bagi lingkungan. "Ada yang sampai menyisakan satu meter saja, sehingga warga setempat indung ke tetangganya. Konsep Mundur Munggah Madhep Kali (M3K) yang sudah digulirkan oleh Guber-

nur harus kita dukung," urainya.

Sementara target penataan kawasan kumuh sepanjang tahun ini mencapai 135 hektare. Pemiannya tidak dibebankan pada APBD Kota Yogya semata melainkan dari berbagai sektor mulai provinsi, DIY hingga swasta. Misalnya sumber dari Bantuan Dana Investasi (BDI) memiliki target 80 hektare di 32 kelurahan, pemerintah pusat menangani 15 hektare, Pemda DIY ditarget 12 hektare, dan Pemkot Yogya mendapat 15 hektare. Selain itu masih ada 15 hektare lagi yang akan ditangani oleh Neighborhood Upgrading and Shelter Project (NUSP).

"Dengan skema ini kami sangat optimis pada tahun 2019 sudah tidak ada kawasan kumuh yang mengacu parameter pemerintah pusat. Harapan kami, wilayah yang sudah ditangani bisa tetap dijaga kualitasnya agar tidak kembali kumuh," harapnya. (Dhi)-c

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005